

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca 1989 *United States* (U.S) dianggap sebagai *great power* didalam politik internasional. Hampir empat dekade U.S hadir dan mempertahankan hagemoninya di Asia-Pasifik. Namun, perubahan itu terjadi setelah China muncul sebagai *rising power* dikawasan ini. Perkembangan militer dan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan berbagai kritik dan kekhawatiran dari negara tetangga. Kemudian hubungan U.S dan Korea Utara terutama dalam isu nuklir membuat dinamika dikawasan Asia-Pasifik begitu kompleks dimana U.S berkepentingan mengawasi program senjata nuklir.¹ Selain itu tantangan yang disebabkan oleh China yang menerapkan strategi *Anti Access and Area Denial* (A2/AD) menjadi perhatian khusus U.S dikarenakan mampu membatasi pergerakan militer U.S.² Melihat hal ini U.S dibawah Presiden Barack Obama mencoba mengatur ulang kebijakan U.S di Asia-Pasifik.³ Tentu hal ini wajar mengingat U.S sebagai kekuatan global mulai khawatir akan pengaruhnya yang terus berkurang dan mengeluarkan kebijakan *pivot to Asia*.

¹ Emma Chanlett, 2016, *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, diakses dalam <https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41259.pdf> (6/5/2017, 20:40 WIB), hal. 1

² Ngo Minh Tri, 2017, *China's A2/AD Challenge in the South China Sea: Securing the Air From the Ground*. diakses dalam <https://thediplomat.com/2017/05/chinas-a2ad-challenge-in-the-south-china-sea-securing-the-air-from-the-ground/> (6/5/2017, 20:50WIB)

³ Vanilla Planifolia, *Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 1, April-September 2017, diakses dalam <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/download/2939/2997> (20/2/2018, 14:20 WIB)

Kebijakan *Pivot to Asia* sendiri secara umum melingkupi beberapa aspek baik diplomatik, ekonomi dan militer.⁴ Aspek yang paling signifikan adalah pada bidang militer. U.S secara aktif memprioritaskan kapabilitas militernya ke wilayah Asia-Pasifik. Hal tersebut didasarkan karena wilayah ini sangat dinamis dan berpotensi muncul kekuatan-kekuatan baru yang dapat menggeser posisi U.S. Banyak para peneliti yang menganggap kebijakan *pivot to Asia* ini sebagai strategi untuk memperkuat posisi U.S dari China. Merealisasikan kebijakan tersebut Leon Panetta dari *Secretary of Defense* mengumumkan bahwa kekuatan U.S sebagian besar akan dipindahkan dari atlantik ke pasifik dengan perbandingan 60:40 persen.⁵

U.S mulai memfokuskan militernya terhadap kawasan Asia-Pasifik sebagai respon terhadap China yang mengadopsi A2/AD. China sendiri adalah negara yang mempunyai GDP terbesar kedua setelah U.S.⁶ Kemampuan ekonomi dan pengaruh yang mulai besar membuat China berambisi untuk ikut andil dalam berbagai isu. Berdasarkan penjelasan dari *White Paper Defense* 2013 selain adanya peningkatan anggaran, upaya modernisasi kekuatan militer China juga terus berkembang, termasuk diantaranya modernisasi pasukan *People's Liberation Army* (PLA) agar mampu mendukung kepentingan nasional China.⁷ PLA

⁴ *Ibid.*,

⁵ BBC, 2012, *Leon Panetta: US to deploy 60% of navy fleet to Pacific*, diakses dalam <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-18305750> (6/5/2017, 23:00 WIB)

⁶ Agustina Melani, 2014, *Ekonomi China Bakal Salip Amerika Serikat*, diakses dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2044062/ekonomi-china-bakal-salip-amerika-serikat> (6/5/2017, 19:30 WIB)

⁷ Fu Peng, 2013, *The Diversified Employment of China's Armed Forces*, *Information Office of the State Council The People's Republic of China*, Beijing hal 4. diakses dalam http://www.nti.org/media/pdfs/China_Defense_White_Paper_2013.pdf (6/5/2017, 21:30 WIB)

dipersiapkan untuk memenangkan perang pada segala kondisi termasuk dalam perang modern.

Kemampuan China menggunakan kekuatan dan peningkatan militer telah menjadi objek perdebatan yang menarik. Strategi militer China yang menjadi fokus U.S adalah A2/AD. Secara umum kegiatan A2/AD dirancang untuk mengontrol daerah laut, darat, dan udara yang bertujuan untuk memenangkan perang lokal di bawah kondisi informasi dengan membuat perencanaan aktif untuk penggunaan angkatan bersenjata pada segala kondisi, menangani secara efektif berbagai ancaman keamanan dan menyelesaikan tugas militer yang beragam dengan dukungan teknologi A2/AD.⁸ Dalam perspektif U.S hal ini merupakan ancaman yang sangat serius. Terbukti untuk mengimbangi strategi ini, U.S menerapkan sebuah konsep *Joint Operational Access Concept* (JOAC) sebagai salah satu elemen penting kebijakan *pivot to Asia* yang merupakan metode untuk memperbaiki efektifitas operasi bersama unit angkatan laut dan angkatan udara U.S. Kemudian U.S juga menerapkan *Air-Sea Battle* (ASB) untuk mendukung penerapan JOAC.⁹ U.S menganggap penerapan ASB yang mengedepankan sebuah operasi militer bersama akan efektif menghadapi sistem A2/AD China.

Strategi militer A2/AD China secara umum merupakan strategi yang sangat kompleks yang melibatkan kapabilitas militer yang canggih. Untuk menerapkannya China melakukan modernisasi PLA dengan kemampuan *command*,

⁸ Jon T. Thomas, 2014, *Implementing Joint Operational Access From Concept to Joint Force Development*, diakses dalam <http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA622247> (10/5/2017, 22:21 WIB), hal. 140

⁹ *Ibid.*,

control, communications, computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) atau sebuah kemampuan yang mengedepankan teknologi komunikasi, kegiatan intelijen dan pengamatan dengan memanfaatkan berbagai teknologi termasuk satelit.¹⁰ Strategi ini memerlukan sumberdaya manusia yang memumpuni dan kecanggihan peralatan militer. Untuk menerapkan A2/AD China melakukan investasi untuk meningkatkan kapabilitas militer. Menurut perusahaan dari Inggris yang khusus bergerak dibidang militer IHS Jane's melaporkan bahwa China merupakan negara dengan anggaran militer terbesar di Asia.¹¹ Pada tahun 2010 China menaikkan anggaran belanja militer sebesar 43 persen, dari US\$ 134 miliar (Rp 1.800,9 triliun) menjadi US\$ 191 miliar (Rp 2.567 triliun) dan hal ini diperkirakan akan terus berlanjut dimana China akan menghabiskan US\$ 255 miliar atau sekitar Rp 3.427,2 triliun sampai 2020.¹² Melihat hal tersebut kebijakan *pivot to Asia* wajar jika dianggap sebagai kebijakan yang mengarah kepada China agar U.S tidak kehilangan pengaruhnya di wilayah Asia-Pasifik.

Berdasarkan laporan *Departemen of Defense* U.S yang berjudul *Sustaining U.S Global Leadership: Priorities for 21 Century Defense* tahun 2012 disebutkan bahwa militer U.S akan terus hadir di Asia-Pasifik dalam rangka *global security*.¹³ Melihat bagaimana politik global yang mulai bergeser kearah Asia-Pasifik tentu merupakan hal yang wajar. Menarik untuk memahami dampak strategi A2/AD

¹⁰ Shane Bilborough, 2013, *China's Emerging C4ISR Revolution*, diakses dalam <https://thediplomat.com/2013/08/chinas-emerging-c4isr-revolution/> (10/5/2017, 22:21 WIB)

¹¹ Tempo, 2016, *Belanja Militer Cina Terbesar di Asia Hingga Tahun 2020*, diakses dalam <https://dunia.tempo.co/read/747504/belanja-militer-cina-terbesar-di-asia-hingga-tahun-2020> (8/5/2017, 19:21 WIB)

¹² *Ibid.*,

¹³ Departemen of Defense U.S, 2012, *Sustaining U.S Global Leadership: Priorities For 21 Century Defense*, Wasington DC, White House, diakses dalam http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf (8/5/2017, 19:21 WIB)

China terhadap proyeksi kekuatan militer U.S di Asia-Pasifik. Hal tersebut dikarenakan kemampuan tersebut secara tidak langsung mengancam kebebasan U.S dalam melakukan operasi militer. Meskipun dalam *China White Paper Defense* China mempunyai prinsip "...*We will not attack unless we are attacked; but we will surely counterattack if attacked...*",¹⁴ dimana prinsip tidak menyerang kalau tidak diserang terlebih dahulu tersebut namun tetap saja U.S merasa A2/AD adalah ancaman. U.S melihat strategi militer A2/AD China ini menjadi tantangan besar bagi U.S saat ini untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik.

A2/AD merupakan salah satu faktor U.S mengeluarkan kebijakan *pivot to Asia* dapat dilihat dari beberapa ancaman-ancaman yang dapat ditimbulkan. Pertama adalah strategi ini dapat mengancam teknologi luar angkasa U.S. Contohnya *Anti-Satellite Weapons Test* (ASAT) yang diluncurkan oleh China mempunyai kemampuan untuk menghancurkan satelit U.S.¹⁵ Karena operasi dan navigator militer U.S sebagian besar bergantung pada satelit dalam operasi maka tentu sangat berbahaya bagi sistem satelit U.S. Analisis PLA mengklaim bahwa luar angkasa merupakan tempat yang vital bagi militer dikarenakan fungsinya sebagai pusat informasi, navigasi dan sensor.¹⁶ Faktor berikutnya A2/AD ini dapat membatasi kebebasan militer U.S karena rudal-rudal balistik China dapat menjangkau kapal-kapal dan pangkalan militer U.S di Asia-Pasifik dan juga menargetkan kapal perang yang sedang bergerak sekalipun. Oleh karena itu U.S

¹⁴ Fu Peng, *Op. Cit.*,

¹⁵ Global Security, *Chinese Anti-Satellite [ASAT] Capabilities*, diakses dalam <https://www.globalsecurity.org/space/world/china/asat.htm> (8/5/2017, 21:22 WIB)

¹⁶ *Ibid.*,

sebagai aktor “*balancer*” hadir untuk mengkonter A2/AD tersebut. Hal inilah yang dilakukan U.S dengan menerapkan kebijakan *pivot to Asia*. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan memindahkan 60 persen militernya ke wilayah Asia-Pasifik dan memperkuat kerjasama militer dengan aliansinya. Berdasarkan dokumen JOAC akan fokus pada kerja sama militer dan operasi bersama dengan aliansi maupun partner di wilayah Asia-Pasifik.

Peningkatan Aliansi U.S ditandai dengan beberapa perjanjian. Pertama adalah perjanjian U.S.-*Government of Japan bilateral SSC agreements*, kedua adalah perjanjian U.S.-Republic of Korea (ROK) *Strategic Alliance* 2015, dan yang terakhir adalah negosiasi dengan Australia dan Singapura.¹⁷ Beberapa perjanjian tersebut menghasilkan beberapa perubahan postur kekuatan U.S di wilayah Asia-Pasifik. Selain perjanjian-perjanjian tersebut U.S juga meningkatkan kerjasama militer melalui latihan militer bersama dengan partner di wilayah Asia-Pasifik yang dimulai sejak tahun 2011. Melalui kerjasama tersebut U.S ingin memperbaiki efektifitas militer dalam lingkungan A2/AD.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian peneliti membatasi cakupan pembahasan yaitu hanya pada **Mengapa U.S Mengeluarkan Kebijakan *Pivot to Asia* Pasca China Menerapkan Strategi Militer A2/AD?**

¹⁷ David J. Berteau & Michael J. Green, 2012, *U.S. Force Posture Strategy in the Asia Pacific Region: An Independent Assessment*, Center for Strategic and International Studies, diakses dalam https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/120814_FINAL_PACOM_optimized.pdf (14/5/2017, 21:46 WIB)

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tujuan dari penelitian “*Analisa Kebijakan Pivot to Asia U.S Pasca China Menerapkan Strategi Militer Anti Access and Area Denial 2011-2016.*” adalah untuk mengetahui alasan U.S mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia* pasca China menerapkan strategi militer A2/AD.

1.3.2 Manfaat Akademis dan Praktis

a. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan ilmu terhadap dunia akademis, khususnya bagi peneliti sendiri mengenai mengapa strategi militer A2/AD China mempengaruhi kebijakan *pivot to Asia* U.S 2011-2016. Penggunaan teori *balance of power* pada penelitian ini akan membantu penelitian selanjutnya dalam kasus yang mirip dengan peneliti. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan teori tersebut untuk memahami suatu fenomena.

b. Manfaat Praktis

Tulisan dapat bermanfaat untuk memberi masukan-masukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kawasan Asia-Pasifik terhadap para pengambil kebijakan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan untuk menjadi pertimbangan untuk menerapkan suatu kebijakan. Kemudian dapat memberi masukan bagi para pemegang kekuasaan untuk memahami fenomena-fenomena hubungan internasional di

abad ke-21 di wilayah Asia-Pasifik terutama tentang strategi militer A2/AD China dan kebijakan *pivot to Asia U.S.*

1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini. Peneliti akan menjelaskan posisi penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Peneliti akan menjelaskan persamaan serta perbedaan penelitian mulai dari judul, teori/konsep, metode penelitian dan hasil penelitian, agar peneliti dapat mengetahui perbedaan hal yang baru terkait penelitian ini.

Penelitian pertama adalah jurnal milik Lt Gen David A. Seorang petinggi *United State Air Force (USAF)* yang berjudul “*A New Era for Command and Control of Aerospace Operations*” yang diterbitkan oleh *Air & Space Power Journal*. Penelitian ini berbicara tentang *command and control (C2)* yang merupakan strategi U.S yang diterapkan untuk mengontrol daerah darat, laut dan udara selama ini. Strategi didukung dengan dibangunnya pusat operasi udara dan angkasa AN/USQ-163 *Falconer*.¹⁸ Strategi ini sangat dominan dan tidak ada yang menandingi selama dua dekade terakhir.

Kemudian dijelaskan situasi tersebut berubah setelah China melakukan modernisasi besar-besaran yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Hal tersebut menjadi ancaman terhadap sistem C2 U.S. Modernisasi yang dilakukan China adalah untuk mendukung strategi militer A2/AD. Sehingga China

¹⁸Gen David A. Deptula, *A New Era for Command and Control of Aerospace Operations*, Air & Space Power Journal, July–August 2014 Volume 28, No. 4 AFRP 10-1. diakses dalam http://pure.fak.dk/portal/files/5548762/PJ_Jul_Aug_2014_C2_edition.pdf (8/9/2017, 19:21 WIB) hal. 4

mengembangkan generasi terbaru dari rudal penjelajah, balistik, *air-to-air*, *surface-to-air missiles*, senjata anti satelit, dan kemampuan luar angkasa untuk membatasi kebebasan dari militer U.S.¹⁹ Karena penerapan A2/AD dapat mengancam U.S melalui beberapa cara. Salah satunya adalah China dapat menggunakan senjata *kinetic and nonkinetic* untuk mengganggu *communications, intelligence, surveillance, and reconnaissance* (CISR) sehingga arus informasi tidak berjalan baik. Hal yang akan terjadi adalah pasukan akan terisolasi dan pimpinan militer U.S akan kesulitan membuat strategi.

Kedua adalah paper milik Alison Lawlor Russell tahun 2015 yang berjudul “*Strategic Anti-Access/Area Denial in Cyberspace*”. Paper ini menjelaskan terkait strategi A2/AD yang sangat mempengaruhi *cyberspace*. Memang dalam perkembangan di era modern ini *cyberspace* sangat penting. Konsep A2/AD yang berkaitan dengan *cyberspace* adalah konsep yang relatif baru dan berkembang dalam sebuah peperangan. Pada sebuah peperangan komunikasi dan informasi menjadi kunci dalam sebuah strategi untuk mencapai kemenangan. A2/AD di *cyberspace* dikenal dengan *cyber A2/AD*. Strategi ini ditujukan untuk serangan *cyber* terhadap musuh yang ditujukan kepada satelit, sistem rudal, navigasi laut maupun udara.²⁰

Cyberspace bisa dijadikan jalan untuk melakukan serangan *cyber* yang akan mendukung A2/AD. Strategi *cyber A2/AD* dapat memanipulasi jaringan dan mampu menangkal kemampuan musuh untuk menggunakan *cyberspace*.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 7

²⁰ Alison Lawlor Russell, 2015, *Strategic Anti-Access or Area Denial in Cyberspace*, Department of Political Science. diakses dalam https://ccdcoe.org/cycon/2015/proceedings/11_russell.pdf, (8/5/2017, 19:15 WIB)

Department of Defense U.S menganggap A2/AD telah menjadi fokus utama dan ancaman U.S. *Cyberspace* sangat penting bagi U.S untuk aktifitas negara terutama militer sehingga penerapan A2/AD sangat mengancam U.S secara langsung.²¹

Penelitian ketiga adalah tesis milik Aldrin Erwinsyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Hubungan Internasional yang berjudul “***Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik tahun 2011***”. Tesis ini sekilas hampir mirip dengan penulis. Tesis ini menggunakan perspektif realis dalam kerangka pemikirannya. Metode yang digunakan oleh Erwin adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah perspektif realis dengan menggunakan teori *balance of power* untuk menjelaskan fenomena.²²

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian Aldrin Erwinsyah, pertama modernisasi militer China membuat U.S menjadi khawatir. Tindakan U.S untuk mengantisipasi hal tersebut adalah melakukan kerjasama regional dengan Jepang dan Korea Selatan. Kedua U.S melihat China mempunyai keinginan untuk menjadi *great power* di Asia Timur sehingga untuk menjaga pengaruhnya U.S mempertahankan militernya untuk mengawasi China. Selain itu U.S juga menjaga Taiwan agar tetap berpisah dengan China. Ketiga China sangat berkepentingan untuk mempunyai angkatan bersenjata yang modern untuk pertahanan nasional

²¹ *Ibid.*,

²² Aldrin Erwinsyah, 2011, *Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik*, Tesis, Universitas Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Hubungan Internasional, diakses dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20279707-T29236-Pengaruh%20modernisasi.pdf> (8/5/2017, 20:45 WIB)

dan menjaga kepentingan China. Oleh karena itu pengembangan *People's Liberation Army* bagi China dirasa sangat perlu.

Penelitian keempat adalah Skripsi milik Ardhiana Fitriyanie Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yang berjudul ***“Kebijakan Pendistribusian Pasukan Militer Amerika Serikat dari Okinawa Ke Guam, Hawaii, dan Darwin 2006-2014”***. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Ardhiana dalam menjelaskan fenomena tersebut menggunakan konsep *hedging*. Konsep ini merupakan strategi alternatif yang biasanya digunakan oleh suatu negara dalam menghadapi ancaman dari negara lain. Kedua adalah konsep kebijakan luar negeri. Menurut James N. Rosenau konsep kebijakan luar negeri memiliki tiga variabel utama yang berbeda yaitu sekumpulan orientasi (*a cluster of orientations*), seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*a set of commitments to and plans for action*) dan bentuk perilaku atau aksi (*a form of behaviour*).²³ Ketiga penelitian ini menggunakan konsep aliansi yang mana menurut Alex Mintz dalam bukunya *Understanding Foreign Policy Decision Making*, mengatakan bahwa aliansi merupakan bentuk sebuah interaksi antar negara terutama dalam hal kapabilitas militer. Negara yang tergabung dalam aliansi berarti telah menandatangani perjanjian militer dimana dalam aliansi

²³ Ardhiana Fitriyanie, 2014, *Kebijakan Pendistribusian Pukan Militer Amerika Serikat dari Okinawa Ke Guam, Hawaii, dan Darwin 2006-2014*, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. diakses dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27293/1/ARDHIANA%20FITRIYANIE-FISIP.pdf> (28/04/2017, 20:36 WIB)

militer jika salah satu negara diserang oleh pihak luar maka negara lain akan membantu menghadapi musuh tersebut.²⁴

Hasil dari tulisan ini adalah pertama hubungan aliansi antara U.S dan Jepang menghasilkan kesepakatan dimana U.S memindahkan pasukan militernya dari Okinawa ke Guam, Hawaii dan Darwin. Selain adanya tuntutan atas penarikan pasukan oleh Jepang, tindakan tersebut adalah sebagai respon menghadapi ancaman di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan Presiden Obama yaitu *pivot to Asia*, yang mana mencoba memperkuat hubungan dengan negara-negara aliansi U.S dan juga membangun hubungan dengan negara-negara nonaliansi dalam bidang militer. Kedua memberikan peluang bagi Jepang untuk meninjau ulang kebijakannya yaitu dengan melakukan *Collective Security Defense* (CSD). Hal ini tentunya memberi dampak positif bagi U.S yang mana dapat memanfaatkan kekuatan dan peralatan militer Jepang untuk menghadapi hegemoni China sebagai potensi negara adidaya baru.²⁵

Penelitian kelima adalah skripsi milik Rendi Pradipta Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul ***“Respon Internasional Terhadap Krisis Nuklir Korea Utara pada Tahun 2006-2009”***. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif. Dalam skripsi ini Rendi menggunakan teori *Regional Security Complex* dan *konsep Collective Security*. Menurut Buzan teori *Regional Security Complex* merupakan teori yang menekankan perhatiannya pada signifikansi unsur regional atau kawasan yang digunakan untuk memahami

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

sebuah dinamika keamanan internasional dimana diaplikasikan melalui *Regional Security Complexs*.²⁶ Teori ini diartikan sebagai sekumpulan negara dimana negara-negara tersebut mempunyai kedekatan dan perhatian utama terhadap keamanan yang membuat negara-negara tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Teori ini meliputi dimensi geografi, etnisitas, dan budaya masyarakat suatu wilayah.

Kemudian yang kedua adalah konsep keamanan kolektif (*collective Security*) dimana konsep membahas masalah keamanan dan menekankan untuk melakukan keamanan kolektif. Konsep ini berbicara tentang pembentukan aliansi internasional untuk tujuan bersama. Keamanan kolektif juga dapat dipahami sebagai suatu tindakan dimana suatu negara melakukan kerja sama untuk menyediakan keamanan. Ada dua poin utama untuk menciptakan keamanan kolektif. Pertama adalah komitmen yang harus dijaga oleh negara. Kemudian yang kedua adalah negara harus menyetujui tindakan yang sudah di setujui. Maka secara garis besar konsep *collective security* mengarah kepada pembentukan suatu institusi internasional.

Ada beberapa hasil yang didapat dari penelitian ini. Pertama adalah uji coba yang dilakukan Korea Utara dianggap sebagai ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Dimana dampak nuklir Korea Utara menyebabkan stabilitas keamanan terancam. Salah satunya adalah banyaknya pengungsi ilegal dari Korea Utara yang kebanyakan ingin masuk ke Korea Selatan. Kemudian uji coba tersebut membuat negara-negara di Asia Timur

²⁶ Rendi Pradipta, 2013, *Respon Internasional Terhadap Krisis Nuklir Korea Utara pada Tahun 2006-2009*, Malang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

merasa terancam.²⁷ Seluruh respon internasional tersebut menegaskan bahwa pengembangan senjata nuklir, kimia, biologis, serta penggunaanya dapat mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Respon internasional muncul sebagai mekanisme untuk mencari solusi dan terciptanya stabilitas keamanan bersama.

Penelitian keenam adalah skripsi milik Rangga Setiawan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul *“Rivalry Between United State Of Amerika And People Republic Of China Over Cyber Tecnology”*. Penelitian tersebut berbentuk deskriptif. Untuk menjelaskan fenomena tersebut pertama Rangga menggunakan teori *cyber arm race*. Teori ini di kemukakan oleh Karl Frederic Raucher dan Zhou Yonglin. Dalam penjelasan mereka *cyber arm race* fokus pada sektor militer meskipun banyak bidang yang dapat dijalankan seperti bisnis, budaya, dan politik.²⁸ *Cyber arm race* tidak hanya dijalankan oleh pemerintah tetapi aktor lain baik individu maupun perusahaan tertentu.

Kedua yang dipakai untuk menganalisa fenomena adalah konsep *Cyber power concept*. Konsep ini diterangkan oleh Joseph Nye Jr sebagai berikut.

*“...Cyber power can be used to produce preferred outcomes within cyberspace or it can use cyber instruments to produce preferred outcomes in other domains outside cyberspace...”*²⁹

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Rangga Setiawan, 2015, *Rivalry Between United State Of Amerika And People Republic Of China Over Cyber Tecnology*, Malang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

²⁹ *Ibid.*,

Sehingga secara garis besar kemampuan dari *cyber* dapat digunakan untuk militer maupun diplomasi dengan membangun opini publik. Hal tersebut mengapa *cyber* sangat penting bagi negara. Melalui penguasaan yang baik sumber informasi yang terkoneksi dengan perangkat memberikan keuntungan yang sangat signifikan.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pertama internet dalam perkembangannya berubah dalam fungsinya. Penggunaanya dapat menjadi alat untuk kegiatan-kegiatan militer yang tentu dapat bersentuhan dengan perang. Karena fungsinya dapat berintegrasi dengan *smart weapon*.³⁰ Kedua adalah pemerintah secara aktif harus ikut serta menjaga keamanan *cyberspace*. Hal tersebut karena tidak aman ketika tidak ada keterlibatan pemerintah dan militer disana. Karena ancaman dapat datang dari siapapun baik individu maupun negara lain dengan kemampuan *hacker*. Ketiga adalah saat ini keamanan tidak hanya berdasarkan batas wilayah tetapi juga pada inovasi teknologi, ilmu pengetahuan, industri teknologi tinggi, data keuangan, yang semuanya tidak dapat dilepaskan dari dunia *cyber*.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu peneliti mengambil topik dengan judul “**Analisa Kebijakan *Pivot to Asia* U.S Pasca China Menerapkan Strategi Militer *Anti Access and Area Denial* 2011-2016.**” Penelitian ini menggunakan teori *balance of power*, kemudian peneneliti menggunakan metode deduktif dan bentuk penelitian penulis adalah eksplanatif. Penulis mengambil data dari internet dan buku-buku.

³⁰ *Ibid.*,

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	JUDUL DAN NAMA PENELITI	JENIS PENELITIAN DAN ALAT ANALISA	HASIL
1.	<p><i>e-Journal : A New Era for Command and Control of Aerospace Operations</i></p> <p>Oleh: Lt Gen David A.</p>	<p>Deskriptif <i>Command and control concept</i></p>	<p>Penelitian ini berbicara tentang <i>command and control</i> (C2) yang merupakan strategi U.S yang diterapkan untuk mengontrol daerah darat, laut dan udara selama ini. Strategi ini didukung dengan dibangunnya pusat operasi udara dan angkasa AN/USQ-163 <i>Falconer</i>. Strategi ini sangat dominan dan tidak ada yang menandingi selama selama dua dekade terakhir.</p> <p>Kemudian dijelaskan situasi tersebut berubah setelah China melakukan modernisasi besar-besaran yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Hal tersebut menjadi ancaman terhadap strategi C2 U.S. Modernisasi yang dilakukan China adalah untuk mendukung strategi militer A2/AD.</p>
2.	<p><i>Paper: Strategic Anti Access/Area Denial in Cyberspace</i></p> <p>Oleh: Alison Lawlor</p>	<p><i>Cyber power concept</i> eksplanatif</p>	<p>Paper ini menjelaskan terkait strategi A2/AD yang sangat mempengaruhi <i>cyberspace</i>. Memang dalam perkembangan di era modern ini <i>cyberspace</i> sangat penting. <i>Cyberspace</i> bisa dijadikan jalan untuk melakukan serangan <i>cyber</i> yang akan mendukung A2/AD. Strategi <i>cyber</i> A2/AD dapat memanipulasi infrastruktur <i>network</i> yang mampu menangkal</p>

			kemampuan musuh untuk menggunakan <i>cyberspace</i> .
3.	<p><i>Tesis : Pengaruh Modernisasi Militer China Terhadap Kebijakan Amerika Serikat di Asia Pasifik tahun 2011</i></p> <p>Oleh : Aldrin Erwinsyah</p>	<p>Deskriptif, perspektif realis, teori: <i>balance of power</i></p>	<p>Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian Aldrin Erwinsyah, pertama modernisasi militer China membuat U.S menjadi khawatir. Tindakan U.S untuk mengantisipasi hal tersebut adalah melakukan kerjasama regional dengan Jepang dan Korea Selatan. Kedua U.S melihat China mempunyai keinginan untuk menjadi <i>great power</i> di Asia Timur sehingga untuk menjaga pengaruhnya U.S mempertahankan militernya untuk mengawasi China. Selain itu U.S juga menjaga Taiwan agar tetap berpisah dengan China. Ketiga China sangat berkepentingan untuk mempunyai angkatan bersenjata yang modern untuk pertahanan nasional dan menjaga kepentingan China.</p>
4.	<p>Skripsi: Kebijakan Pendistribusian Pasukan Militer Amerika Serikat dari Okinawa Ke Guam, Hawaii, dan Darwin 2006-2014</p> <p>Oleh: Ardhiana Fitriyanie</p>	<p>Kualitatif-deskriptif Konsep: <i>Hedging</i>, kebijakan luar negeri, aliansi.</p>	<p>Hasil dari tulisan ini adalah pertama hubungan aliansi antara U.S dan Jepang menyebabkan U.S menyebarkan dan memindahkan pasukan militernya dari Okinawa ke Guam, Hawaii dan Darwin. Selain adanya tuntutan atas penarikan pasukan U.S oleh Jepang, hal ini disebabkan untuk dilakukan sebagai respon ancaman di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan Presiden Obama yaitu <i>pivot to Asia</i>, yang mana U.S mencoba memperkuat hubungannya</p>

			dengan negara-negara aliansi dan negara-negara non-aliansi dalam bidang militer.
5	<p>Skripsi: Respon Internasional Terhadap Krisis Nuklir Korea Utara pada Tahun 2006-2009</p> <p>Oleh: Rendi Pradipta</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p> <p>Teori: <i>Regional Security Complex Collective Security</i></p>	<p>Ada beberapa hasil yang didapat dari penelitian ini. Ada beberapa hasil yang didapat dari penelitian ini. Pertama adalah uji coba yang dilakukan Korea Utara dianggap sebagai ancaman yang serius bagi stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Dimana dampak nuklir Korea Utara menyebabkan stabilitas keamanan terancam. Salah satu dampaknya adalah banyaknya pengungsi ilegal dari Korea Utara yang kebanyakan ingin masuk ke Korea Selatan. Kemudian uji coba tersebut membuat negara-negara di Asia Timur merasa terancam. Seluruh respon internasional tersebut menegaskan bahwa pengembangan senjata nuklir, kimia, biologis, serta penggunaannya dapat mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Respon internasional muncul sebagai mekanisme untuk mencari solusi dan terciptanya stabilitas keamanan bersama.</p>
6.	<p>Skripsi : <i>Rivalry Between United State Of Amerika And People Republic Of China Over Cyber Tecnology</i></p> <p>Oleh: Rangga Setiawan</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p> <p>Teori/konsep: <i>Cyber power concept.</i></p>	<p>Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pertama internet dalam perkembangannya berubah dalam dalam fungsinya. Penggunaannya dapat menjadi alat untuk kegiatan-kegiatan militer yang tentu dapat bersentuhan dengan perang.</p>

			<p>Karena fungsinya dapat berintegrasi dengan <i>smart weapon</i>. Kedua adalah pemerintah secara alami harus ikut serta menjaga keamanan <i>cyberspace</i>. Hal tersebut karena tidak aman ketika tidak ada keterlibatan pemerintah dan militer disana. Karena ancaman dapat datang dari siapapun baik individu maupun negara lain dengan kemampuan <i>hacker</i>. Ketiga adalah saat ini keamanan tidak hanya berdasarkan batas wilayah tetapi juga pada inovasi teknologi, ilmu pengetahuan, industri teknologi tinggi, data keuangan, yang semuanya tidak dapat dilepaskan dari dunia <i>cyber</i>.</p>
7.	<p>Skripsi: Analisa Kebijakan <i>Pivot to Asia</i> U.S Pasca China Menerapkan Strategi Militer <i>Anti Access and Area Denial</i> 2011-2016</p> <p>Oleh: Endra Kurniawan</p>	<p>Deduktif Explanatif Teori/Konsep: <i>Balance of Power</i></p>	<p><i>Anti-access</i> merupakan strategi jarak jauh untuk mencegah musuh memasuki area dan anti denial merupakan strategi jarak dekat untuk membatasi pergerakan militer lawan. A2/AD merupakan strategi yang membutuhkan integrasi dari berbagai domain. Sehingga dalam operasionalnya China membutuhkan <i>command, control, communications, computers, Surveillance and Reconnaissance</i> (C4ISR). U.S melakukan respon terhadap A2/AD karena beberapa hal pertama adalah strategi ini dapat mengancam teknologi luar angkasa U.S. Kedua A2/AD ini dapat membatasi kebebasan militer U.S karena rudal-rudal balistik U.S dapat</p>

			menjangkau kapal-kapal dan pangkalan militer U.S di Asia-Pasifik.
--	--	--	---

1.5 Landasan Teori

1.5.1 *Balance Of Power*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *balance of power* untuk menjelaskan fenomena. *Balance of power* sendiri merupakan teori klasik yang digunakan para Ilmuan Hubungan Internasional untuk menjelaskan perilaku negara-negara sampai saat ini. Asumsi dari teori ini adalah untuk mencegah timbulnya hegemoni negara-negara akan membentuk koalisi dan kontra koalisi dan kemudian aktor yang disebut “*balancer*” akan cenderung memihak yang lemah dalam rangka memulihkan ketidakseimbangan tersebut. Menurut teori ini juga bahwa perilaku negara tersebut dipengaruhi oleh struktur sistem secara keseluruhan.³¹

Balance of power lahir dari paradigma realis dalam hubungan internasional yang menganggap bahwa sistem internasional adalah anarki. Realis menggambarkan hubungan internasional adalah persaingan antar negara dalam mempertahankan autonomi dan meningkatkan power. Dougherty dan Pfaltzgraff memberikan empat dasar asumsi dalam paradigma realis. Pertama adalah negara-negara adalah pelaku utama dalam sistem internasional terdiri dari negara berdaulat independen. Kedua domestik dan kebijakan luar negeri secara jelas adalah area terpisah atas kebijakan nasional. Ketiga politik internasional adalah

³¹ Mohtar mas'oed, 1990, *Metodologi Hubungan Internional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 48

persaingan dan perlombaan kekuasaan didalam lingkungan yang anarki. Keempat negara memiliki kemampuan yang berbeda untuk mencapai tujuan dan mempertahankan kepentingannya. Tugas negara adalah mengidentifikasi dan menetapkan prioritas kepentingan nasional sesuai dengan setiap perubahan yang terjadi. Karena sistem internasional yang anarki akan mempengaruhi stabilitas keamanan, oleh karena itu negara dapat membentuk sistem yang seimbang, sehingga menjamin keamanan, stabilitas, kekuasaan dan pengaruhnya.

Balance of power sebagai sebuah distribusi. Beberapa ilmuwan hubungan internasional menggunakan teori ini untuk menunjukan distribusi kekuasaan. Para ilmuwan mengisyaratkan *Balance of power* berarti adanya distribusi sumberdaya yang relatif seimbang. Kemudian yang kedua *balance of power* sebagai kebijakan nasional. Disini perimbangan kekuasaan menjadi kebijakan berupa defensif demi mencegah suatu aktor menjadi dominan. Maka disini suatu negara akan berperan sebagai *balancer* yang bergabung dengan pihak koalisi.³² *Balance of power* memiliki definisi menurut beberapa ahli antara lain menurut Fenelon:³³

“...Tindakan oleh sebuah negara untuk menjaga agar tetangganya tidak terlalu kuat, karena perluasan satu negara di luar batas tertentu akan mengubah sistem umum semua negara lainnya ... memperhatikan pemeliharaan kesetaraan dan keseimbangan antara negara-negara tetangga...”

Menurut Palmer and Perkins *balance of power*

“...mengumsikan bahwa melalui aliansi dan tekanan yang berlawanan, tidak ada satu kekuatan atau kombinasi

³² *Ibid.*, hal.154-157

³³ Michael Sheehan, 1996, *The Balance of Power : History & Theory*, London : Routledge, hal. 2

kekuatan yang diizinkan untuk tumbuh begitu kuat hingga mengancam keamanan selebihnya... ”³⁴

Sedangkan *balance of power* menurut Morgenthau adalah

“...the balance of power mengacu pada keadaan sebenarnya dimana kekuasaan didistribusikan di antara beberapa negara dengan seimbang... ”³⁵

Selanjutnya untuk memahami teori *balance of power* seorang harus dapat membedakan antara *balance of power* sebagai sebuah kebijakan dan *balance of power* sebagai sebuah sistem internasional. Sebagai sebuah kebijakan *balance of power* mendukung terciptanya suatu yang seimbang dan mencegah satu kekuatan menjadi dominan. Kebijakan tersebut dilakukan agar negara yang ingin dominan itu tidak mampu untuk menjadi *hegemon*. Kemudian *balance of power* sebagai sebuah sistem menggambarkan bagaimana dalam sebuah sistem internasional melibatkan beberapa negara yang saling ketergantungan. Sebuah interaksi kumpulan negara yang melibatkan pembagian kekuasaan yang membuat suatu dampak timbal balik antar negara-negara tersebut. Organski mengidentifikasi 6 metode yang mungkin diambil oleh para pengambil kebijakan untuk menjaga *balance of power* yaitu peningkatan kapabilitas senjata, memperluas teritori, membangun *buffer zone*, membentuk aliansi, mengintervensi kebijakan internal negara lain, dan menaklukkan negara lain.³⁶ Ketika suatu negara tidak mampu untuk mendapatkan “*equality*” negara tersebut akan mengambil kebijakan *balance of power* dengan metode aliansi dan modernisasi persenjataan.

³⁴ *Ibid.*, hal. 3

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Organski, A.F.K., 1968, *World Politics*, 2nd edn, Knopf, New York. hal. 267. Dalam Michael Sheehan, 1996, *The Balance of Power: History & Theory*, London: Routledge, diakses dalam https://www.chinhnghia.com/Michael_Sheehan_The_Balance_of_Power_History_an_BookFi.pdf (6/5/2017, 20:40 WIB), hal. 54

Selanjutnya dalam bukunya, Michael Sheehan membahas beberapa hal terkait *balance of power*. Pertama adalah kebijakan negara untuk membentuk aliansi. Seperti yang ditulis Gulick cara paling logis untuk mempromosikan *balance of power* di antara negara adalah memastikan bahwa mereka semua memiliki kekuatan yang sama.³⁷ Tetapi pada kenyataannya skema seperti itu sangat susah untuk direalisasikan contohnya adalah Kongres Wina 1814–1815 yang sangat jauh dari ideal. Akibat kesetaraan negara tidak dapat dicapai, pilihan terbaik berikutnya adalah membentuk aliansi untuk menciptakan kesetaraan kekuasaan yang efektif antara negara-negara. Ketidaksetaraan wilayah dan militer negara-negara dapat dikoreksi melalui sistem aliansi. Aliansi memudahkan negara dalam bertindak menciptakan *balance of power* dan untuk mengatasi ancaman yang tidak bisa mereka atasi hanya dengan sumber daya mereka sendiri. Selain aliansi negara juga dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan reformasi internal, tetapi sulit untuk menghasilkan peningkatan yang besar dengan waktu yang singkat. Cara tercepat untuk mencapai tujuan ini adalah dengan aliansi atau dengan mengurangi aliansi pihak musuh.

Kedua Sheehan membahas terkait perang dalam mencapai *balance of power*. Para teoritis dan praktisi yang paling jelas, Metternichs dan Castlereaghs berpikir tentang perang sebagai alat untuk melestarikan atau mengembalikan

³⁷ Gulick, E.V. (1955) *Europe's Classical Balance of Power* (Ithaca, New York and London), hal 58–60 dalam Michael Sheehan, 1996, *The Balance of Power: History & Theory*, London: Routledge, diakses dalam https://www.chinhnghia.com/Michael_Sheehan_The_Balance_of_Power_History_an_BookFi.pdf (6/5/2017, 20:40 WIB), hal 54

keseimbangan.³⁸ Pada dasarnya *balance of power* hanyalah sebuah formula yang dirancang untuk mencegah kebangkitan suatu bangsa untuk mendominasi dunia. Hal tersebut merupakan formula untuk menciptakan suatu perdamaian. Perang adalah konsekuensi wajar dari kebijakan *balance of power*.

Ketiga adalah perdamaian terpisah sebagai taktik. Salah satu fitur dari kebijakan luar negeri Inggris diabad kedelapan belas adalah kebiasaannya mengingkari kewajiban perjanjian. Namun, aspek yang paling menarik dari perilaku tersebut adalah kebiasaannya melakukan perdamaian terpisah di akhir perang. Partisipasi Inggris dalam perang suksesi Spanyol, perang dunia suksesi Austria, dan perang tujuh tahun, semua berakhir dengan Inggris meninggalkan sekutu utamanya.

Keempat pembahasan terkait *balancer*. Kebijakan penyeimbang (*balancer*) adalah kebijakan yang dapat dicita-citakan oleh negara mana pun, meskipun hanya sedikit yang dapat memenuhi persyaratannya. Fungsi dasar penyeimbang adalah mencegah terjadinya suatu ketidakseimbangan permanen dalam sistem internasional, yaitu adanya situasi dimana satu negara atau aliansi mampu mengatasi hegemoni negara lain. Operasi *balancer* mengasumsikan keberadaan terstruktur internasional sedemikian rupa sehingga penyetaraan *balancer* dengan satu negara atau aliansi dalam sistem akan cukup untuk memulihkan ketidak seimbangan kekuasaan. Aktor *balancer* mempertahankan keseimbangan melalui fleksibilitas diplomatiknya, menggeser dukungannya dari

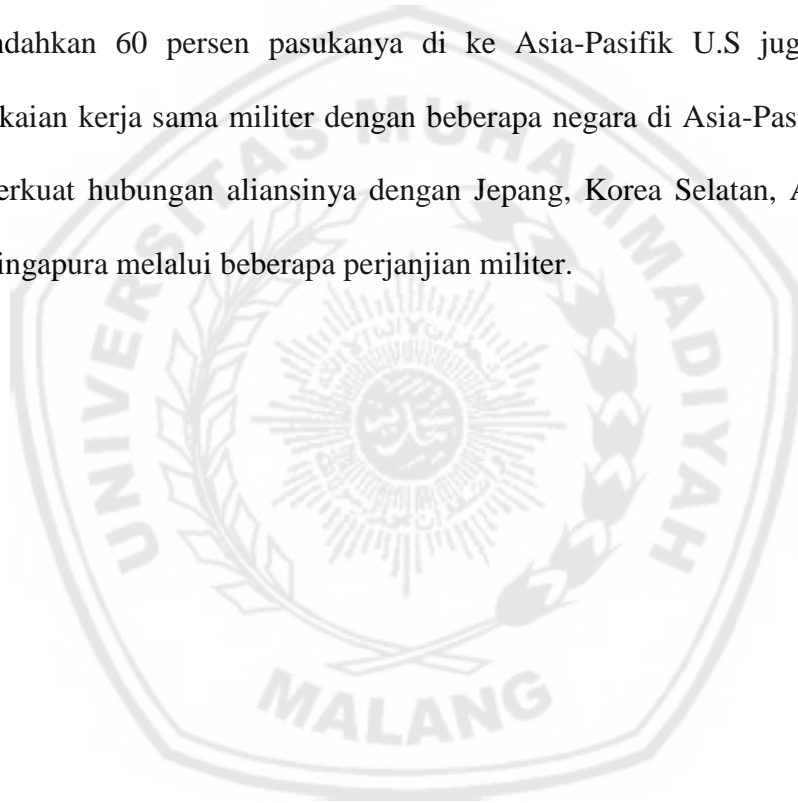
³⁸ Michael Sheehan, 1996, *The Balance of Power: History & Theory*, London: Routledge, diakses dalam https://www.chinhnghia.com/Michael_Sheehan_The_Balance_of_Power_History_an_BookFi.pdf (6/5/2017, 20:30 WIB), hal. 59

satu sisi ke sisi lain, mendukung yang lebih lemah melawan yang lebih kuat, jika perlu bahkan hingga penggunaan kekuatan militer.

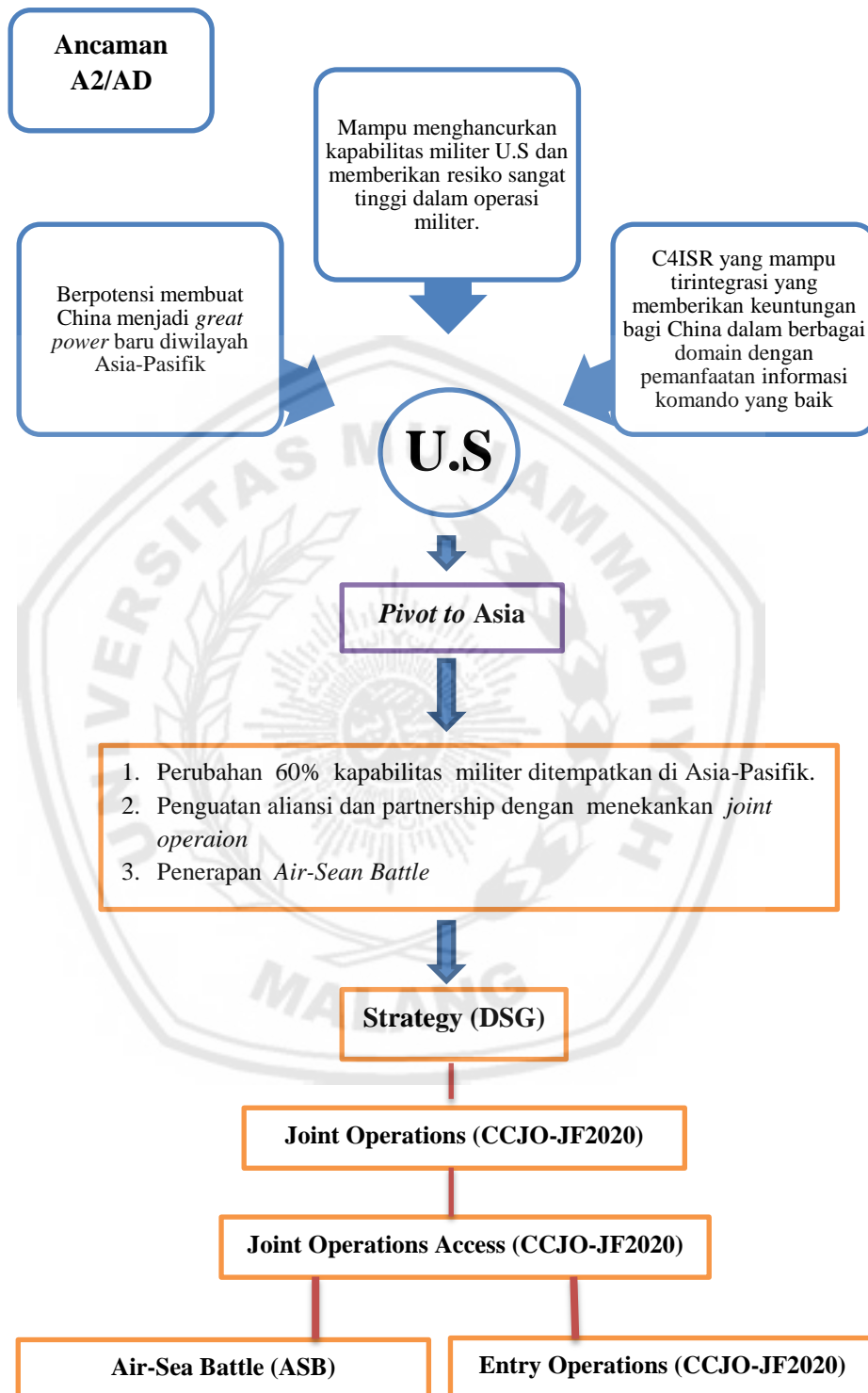
Kelima adalah pembahasan terkait partisi dan kompensasi. Sheehan menjelaskan bahwa terlihat paradoks ketika partisi atau pemisahan dimasukan sebagai salah satu sarana negara untuk menjaga *balance of power*. Seperti ide dasar *balance of power* yang bertujuan untuk mencegah munculnya kekuatan dominan dengan melestarikan kedaulatan dan membentuk sistem internasional. Berdasarkan pemahaman itu maka setiap negara harus mendukung independensi negara lain dalam sistem. Selama abad kedelapan belas gagasan *balance of power* terus berkembang dan dilihat sebagai sebuah perangkat untuk melakukan stabilisasi sistem melalui kekuatan-kekuatan besar setiap anggota sistem negara. *Balance of power* dipertahankan dengan cara mengorbankan negara-negara kecil. Seperti perjanjian Wina pada tahun 1815 yang membebani banyak negara kecil. Oleh karena itu menurut Brougham penerapan partisi atau pemisahan dan juga aneksasi untuk menjaga *balance of power* adalah salah dan gagal dalam sejarah.

Keenam adalah pembahasan terkait moderasi. Moderasi, dalam konteks ini, memiliki arti yang terbatas. Negara-negara yang menang setelah *balance of power war* harus berusaha untuk tidak mempermalukan atau menghancurkan musuh. Alasannya adalah bahwa negara yang baru saja kalah akan menjadi aktor penting dalam keseimbangan sistem kekuasaan pasca perang dan kehadiran mereka mungkin penting untuk menahan satu atau lebih dari para pemenang baru dimana mempunyai cita-cita untuk memainkan peran dominan mereka sendiri.

Untuk menganalisa penelitian ini peneliti akan menggunakan salah satu metode kebijakan *balance of power* dari Sheehan yaitu aliansi sebagai sebuah kebijakan *balance of power*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Presiden Barack Obama pada tahun 2008 mulai meninjau kembali strategi global U.S di Asia-Pasifik. Dia menemukan bahwa militer U.S terlalu fokus di Timur Tengah. Pada tahun 2011 U.S mengumumkan kebijakan *pivot to Asia* dimana selain memindahkan 60 persen pasukanya di ke Asia-Pasifik U.S juga melakukan serangkaian kerja sama militer dengan beberapa negara di Asia-Pasifik. U.S juga memperkuat hubungan aliansinya dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan juga Singapura melalui beberapa perjanjian militer.



Skema Penelitian



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, maka tipe penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penelitian eksplanatif. Eksplanatif sendiri secara metodologi adalah upaya untuk menjelaskan pertanyaan mengapa. Secara spesifik dalam hubungan internasional terdapat tingkat analisa untuk meneiliti suatu fenomena. Kemudian untuk menentukan tingkat analisa pertama kita perlu menetapkan unit analisa (variabel dependen) yaitu variebel yang hendak dideskripsikan. Kemudian kedua kita menentukan unit eksplanasi (variable independen) yaitu variabel untuk menjelaskan unit analisa.³⁹

1.6.2 Metode Analisa

Metode analisa data yang digunakan peneliti merupakan metode deduksi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat suatu fenomena terlebih dahulu dan mencari teori yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut.

1.6.3 Tingkat Analisa

Tingkat analisa yang dikaji oleh peneliti yaitu korelasionis dimana menempatkan unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkat yang sama. Oleh karena itu strategi militer A2/AD China adalah pada level negara

³⁹ Mohtar mas'oed *Op. Cit*, hal 39

sebagai unit eksplanasi, sedangkan kebijakan *pivot to Asia* U.S juga pada level negara sebagai unit analisa.⁴⁰

1.6.4 Variabel Penelitian

Dalam fenomena yang dikaji oleh peneliti, terdapat dua variabel yang saling berhubungan dalam penelitian ini. Dua variabel yang saling berpengaruh yaitu variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, strategi militer A2/AD China sebagai variabel independen yang mana sebagai variabel yang mempengaruhi. Sedangkan *pivot to Asia* U.S sebagai variabel dependen yaitu sebagai variabel yang dipengaruhi.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Peneliti memberi batasan waktu mulai dari 2011-2016. Tahun 2011 Karena kebijakan *pivot to Asia* U.S baru diperkenalkan pada tahun tersebut untuk mengimbangi A2/AD. Kemudian dinamika kebijakan ini terjadi hingga tahun 2016. Kemudian mempertimbangkan penelitian sebelumnya dengan topik yang sama yang membahas hingga tahun 2012.

b. Batasan Materi

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji alasan U.S mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia* pasca China menerapkan strategi militer A2/AD.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 44

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah studi pustaka atau studi literatur. Peneliti mendapatkan data-data melalui buku, *journal*, *e-journal*, tesis, skripsi, *working paper*, tulisan ilmiah yang isinya dapat dipertanggung jawabkan, website dan situs-situs resmi yang memiliki korelasi dengan isi penelitian.

1.7 Hipotesis

Peneliti memilih teori *balance of power* sebagai alat analisa dari penelitian ini. Seperti yang dijelaskan para ilmuwan realis dalam *balance of power*, dimana tugas negara adalah mengidentifikasi dan menetapkan prioritas kepentingan nasional sesuai dengan setiap perubahan yang terjadi. Sistem internasional yang sifatnya anarki membuat negara harus mampu untuk memelihara keseimbangan dalam sistem internasional melalui kebijakannya. Teori *balance of power* mampu untuk menjelaskan kebijakan *pivot to Asia U.S* yang mana bertujuan untuk mengkonter strategi militer A2/AD China. Salah satu teoritis Michael Sheehan menjelaskan beberapa metode yang mungkin diambil oleh suatu negara untuk melakukan *balancing*. Salah satu metode yang dikemukakan Sheehan adalah Aliansi. Negara membentuk Aliansi karena dalam prakteknya akan lebih cepat untuk terciptanya *balance of power*. Akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan transformasi internal sehingga metode aliansi menjadi pilihan sebagai kebijakan *balancing*.

Teori ini mampu untuk menjelaskan kebijakan *pivot to Asia U.S* di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk membendung

kekuatan China dibidang militer. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan memperkuat kerjasama militer dengan negara aliansi maupun partner di wilayah Asia-Pasifik. Melalui kebijakan tersebut U.S ingin melakukan *balancing* terhadap kekuatan militer China. U.S menganggap China ingin menjadi *hegemon* di wilayah Asia-Pasifik melalui kemampuan A2/AD. U.S merasa dibawah lingkungan A2/AD kebebasan operasi militer U.S sangat terbatas dan beresiko. Kemampuan A2/AD yang didukung *command, control, communications, computers, Intelegent, Surveillance and Reconnaissance* (C4ISR) dan juga menggunakan sistem rudal dengan jangkauan yang cukup jauh, menyebabkan kapal-kapal U.S akan sangat sulit untuk memasuki daerah yang dijangkau rudal-rudal China. Selain itu U.S juga merasa terancam dengan ASAT yang dikembangkan oleh China yang digunakan untuk kemampuan A2/AD pada sektor *cyberspace*.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1.Latar Belakang
	1.2.Rumusan Masalah
	1.3.Manfaat Dan Tujuan Penelitian
	1.3.1. Tujuan Penelitian
	1.3.2. Manfaat Akademis dan Praktis
	1.4.Penelitian Terdahulu
	1.5.Landasan Teori
	1.6.Metode Penelitian
	1.6.1. Jenis Penelitian
	1.6.2. Metode Analisis
	1.6.3. Tingkat Analisa
	1.6.4. Variabel Penelitian
	1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian
	1.6.6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
	1.7.Hipotesis

	1.8.Sistematika Penulisan
BAB II	STRATEGI MILITER A2/AD CHINA 2.1. Potensi Status <i>Great Power</i> China di Asia-Pasifik Melalui Modernisasi <i>People's Liberation Army</i> (PLA) 2.2. Peningkatan Kapabilitas Militer China Dalam Penerapan Strategi A2/AD
BAB III	KEBIJAKAN PIVOT TO ASIA U.S 3.1. Alasan U.S mengeluarkan kebijakan <i>pivot to Asia</i> sebagai <i>Balancing</i> terhadap strategi A2/AD China 3.1.1 Ancaman <i>Ballistics and Cruise Missiles</i> dalam Sistem Pertahanan A2/AD 3.1.2 Peningkatan Sistem <i>Command, Control, Communications, Computers, Surveillance and Reconnaissance</i> (C4ISR) Sebagai Pendukung Strategi A2/AD 3.1.3 Ancaman Pengembangan Teknologi <i>Anti-Satellite Weapons Test</i> (ASAT) 3.2. <i>Pivot to Asia</i> Sebagai Kebijakan <i>Balance of Power</i> U.S Terhadap Strategi <i>Anti Acces and Area Denia</i> 3.2.1 <i>Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020</i> (CCJO) Sebagai Doktrin Umum Kebijakan <i>Pivot To Asia</i> U.S 3.2.1.1 Strategi <i>Air Sea Battle</i> (ASB) Sebagai Elemen <i>Pivot To Asia</i> U.S Untuk Mengkounter Strategi A2/AD China 3.2.2.1 Penerapan <i>Doktrin Joint Concept for Entry Operations</i> (JCEO) U.S Untuk <i>Freedom Operation</i> Dalam Lingkungan A2/AD 3.3. Penguatan Hubungan Aliansi dan <i>Partnership</i> Kebijakan <i>Pivot to Asia</i> 3.4. Peningkatan Kababilitas Militer U.S di Asia-Pasifik Sebagai Implementasi <i>Piviot To Asia</i>
BAB IV	PENUTUP 4.1. Kesimpulan 4.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA	